

Strategi Kontemporer Partai-partai Politik di Indonesia 2004-2009

Oleh:
Mardiyanto Wahyu Tryatmoko

Resensi Buku

Judul : *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*
Penulis : Litbang Kompas
Penerbit : Penerbit Buku Kompas, Februari 2004
Tebal buku : X + 550 halaman

Abstract

The public perception and choice to a specific political party or politician, which based on intuition or rationality, are absolutely depended on historical experiences and the rise of discourse of political parties and politicians' behavior it selves. However, every performance of political parties with all of their conflicting interests that happens to them is directly influenced by the electoral and parties system. On the other hand, this system converts votes in the polling booth into seats in the assembly and simultaneously converts the behavior of political parties -including the politicians- on the intra or extra parliament. In the meantime, when the people are in deep participation towards democratization of the electoral and parties system, will political parties be able to be more mature and wise as their role, including fairly competition during elections? Will the national bad experiences be made as fuel of struggle that is stated in their programs? It is not false, if undecided voters and violence by the people because of an endless oligarchy usually respond these questions. One of solutions that can avoid it is the maturity of political culture and the reinforcement of parties system.

Menarik mengikuti pelaksanaan pemilu 2004 di beberapa daerah di republik ini. Fenomena konstituen dalam menentukan pilihannya memiliki latar belakang yang bervariasi bukan saja karena *interest*-nya terhadap kesamaan ideologi, program, atau figur, namun juga banyak faktor yang muncul akibat "keterpaksaan". Seperti halnya, potret pelaksanaan pemilu yang terjadi di beberapa daerah rawan konflik seperti Aceh dan Papua. Partisipasi masyarakat di Aceh dalam menentukan pilihannya seperti *hanya sekedar mencoblos*, atau datang ke bilik suara karena khawatir akan berhadapan dengan sejumlah pertanyaan dari "orang-orang" yang akan mempertanyakan ketidakhadirannya. Bahkan ada yang memiliki alasan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai "penghormatan" kepada pihak yang melaksanakan pemilu meskipun sebelum-

nya mereka merasa tidak dihormati. Fenomena yang terjadi di Papua lebih menarik lagi ketika masyarakat yang terlihat begitu antusias datang ke TPS lebih dikarenakan ketakutannya jika dianggap OPM, sehingga banyak penduduk yang ditolak melakukan hak pilihnya ketika datang ke TPS hanya karena tidak memiliki kartu pemilih. Banyak lagi yang beranggapan jika memilih semakin banyak partai (dalam satu surat suara), maka hasilnya akan sinergis dengan banyaknya perhatian pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat Papua. Alhasil, banyak surat suara yang tidak sah.¹

Gambaran itulah yang merupakan sisi lain dari alasan masyarakat untuk memberikan pilihannya dalam pemilu 2004. Fenomena di atas sangatlah wajar mengingat kondisi mereka yang berada di

¹ Lihat pemberitaan *Kompas*, 10 April 2004.

kantong-kantong 'separatis'. Namun di luar "keterpaksaan" tersebut, bagaimana dengan masyarakat yang secara sadar memberikan pilihannya baik atas pertimbangan hati nurani maupun rasionalitasnya? Motif kuat apa yang mendasari pilihannya, dari sekian banyak alternatif calon politisi maupun partai itu sendiri? Apakah sebenarnya yang ditawarkan oleh parpol untuk mempengaruhi pilihan masyarakat?

Penilaian dan pilihan masyarakat terhadap suatu partai atau politisi tertentu yang didasarkan atas intuisi maupun rasionalitasnya pastilah didasarkan dari pengalaman historis dan wacana yang berkembang atas perilaku partai atau politisi tersebut. Padahal, segala tingkah laku partai politik dengan segala konflik kepentingan yang mereka jalani dipengaruhi secara langsung oleh sistem kepartaian dan pemilu.² Dengan kata lain, sistem inilah yang bisa mengubah suara di dalam kotak suara menjadi kursi di dalam dewan, dan sekaligus juga mengubah perilaku partai — termasuk para politisinya — baik intra maupun ekstraparlementer.

Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan sistem multipartai keempat setelah pemilu tahun 1955, 1971, dan 1999 yang lebih menganut *pluralism party system* dibandingkan dengan pemilu lainnya yang lebih mengarah pada *hegemonic party system*. Meskipun sebenarnya pluralism yang dimaksud masih dalam koridor pembatasan "administratif". Keterbukaan ini menyebabkan munculnya banyak nama partai politik baru di samping partai politik lama yang lolos *electoral threshold*. Hal ini jelas berimplikasi pada besarnya jumlah parpol dalam pemilu 2004 yang tidak seimbang dengan diferensiasi ideologi atau *platform*, karena ideologi dan *platform* bahkan program partai politik di Indonesia cenderung bernilai relatif konstan. Sedangkan ideologi, *platform*/program yang

nilainya konstan tersebut, praktis tidak akan mampu dibagi lagi menjadi banyak kepengurusan kuat dengan banyak label partai politik baru. Inilah sebabnya mengapa banyak partai politik yang tidak lolos dalam verifikasi (penentuan) sebagai peserta pemilu 2004 ketika ada pembatasan syarat minimal jumlah kepengurusan.

Peserta pemilu 2004 lebih sedikit dibandingkan dengan peserta pemilu 1999. Hal ini mungkin disebabkan oleh peraturan yuridis formal yang lebih memberikan batasan tentang syarat keikutsertaan parpol dalam pemilu 2004. Verifikasi yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan HAM serta KPU menghasilkan 24 parpol yang berhak ikut dalam pemilu 2004, sedangkan partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU sebanyak 26 parpol, partai politik yang dibatalkan sebagai badan hukum berjumlah 153, dan partai politik yang tidak memenuhi persyaratan UU No. 31 Tahun 2004 sebanyak 58. Jumlah ini cukup fantastis untuk dijadikan sebagai indikator keterwakilan kepentingan masyarakat. Asumsi yang bisa ditarik dari realitas di atas adalah banyak "pejuang baru" di negara ini yang ingin menunjukkan eksistensinya dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat meskipun terkadang hanya dengan modal janji-janji "reformis".

Setidaknya, banyak alasan yang menjadi dasar pembentukan beberapa partai politik baru. **Pertama**, kemunculan partai baru sebagai pecahan partai lama lebih dimunculkan akibat kekecewaan politisi lama terhadap gaya politik "penguasa" partai yang bersangkutan. **Kedua**, keyakinan politisi partai yang memiliki peluang untuk menunjukkan kemampuannya yang lebih *marketable* dibanding jika dia masih berada dalam posisi lama. **Ketiga**, bagi politisi di dalam partai yang benar-benar baru, ia akan mencoba menjual ketokohnya dengan jalan mengembangkan jaringan dan dukungan dari jabatan yang dipegangnya saat itu. Bagaimanapun, yang sedang atau masih *trend* di Indonesia saat ini adalah mengentalnya politik ketokohan.

² Anthony H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, (Routledge, London and New York, 2nd Edition, 2002).

Kemunculan partai baru juga lebih disebabkan karena fenomena neo konservatisme yang melekat di dalam kepengurusan partai politik. Fenomena ini akan selalu mengkultuskan sosok populer yang relatif laku jual, dan tentu saja akan menyingkirkan rasio rivalitasnya. Kemenangan itulah yang menyingkirkan dan mengakibatkan tokoh penting lain yang akan segera membentuk sistem oligarki baru. Teori *trickle down effect* pembentukan partai baru akan sangat menjelaskan bagaimana ideologi yang sama akan muncul akibat perpecahan tersebut. Beberapa tokoh partai lama yang mengalami kekecewaan akibat kedudukannya, secara otomatis membentuk partai baru yang memiliki kesamaan ideologi. Bagaimanapun juga politik aliran yang dikemukakan oleh Clifford Gertz tampaknya masih berlaku dan menjadi strategi bagi beberapa partai baru.

Sebaliknya, pembentukan partai baru -di luar sebab perpecahan dari partai lama- cenderung menyebabkan berkembangnya asas baru yang lambat laun akan memudarkan politik aliran. Bahkan beberapa partai lama dan baru memiliki strategi untuk tidak terpaku pada politik aliran ini. Memang beberapa di antaranya membentuk partai baru dengan asas yang relatif sedikit berbeda untuk bisa lebih diterima massa. Ditambah lagi kemudian partai baru dengan tokoh baru membentuk *platform* yang lebih “majemuk” untuk bisa *cover* banyak aspirasi dan ideologi massa.

Sangat mustahil terjadi bagi partai politik yang baru mencalonkan sebagai peserta pemilu akan berafiliasi dengan partai lama karena telah sadar akan kapasitasnya, kecuali jika kemampuannya sudah benar-benar disaring oleh perundangan yang berlaku. Hal itu pun sangat jarang terjadi aliansi. Seperti halnya beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi kemudian bergabung dengan parpol yang lolos.³ Letak permasalahan

yang sebenarnya adalah banyaknya “politisi baru” yang ingin segera berkuasa dengan strategi “jalan pintas”. Alasan kuat mereka adalah tidak mungkin untuk tetap bertahan dalam partai lama atau bergabung dengan partai lain tanpa memiliki daya tawar tinggi yang akan bisa mendudukkan mereka dalam kursi legislatif. Strategi yang paling memungkinkan adalah membentuk aliansi baru dengan kesamaan tujuan kekuasaan dalam suatu wadah baru. Hitung-hitungan dukungan yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah atas dasar intuisi dan jaringan semu. Banyak politisi parpol baru beranggapan dan berkeyakinan bahwa banyak dukungan yang mengarah kepadanya. Baik itu dukungan yang bersifat lokal atau sekedar menempatkan dia menjadi politisi lokal, sampai dengan asumsi jaringan yang lebih luas misalnya dukungan militer, birokrat, ataupun pengusaha.

Memperjelas uraian di atas, sebenarnya kita bisa mencermati dengan jelas apa sebenarnya yang ditawarkan oleh partai politik peserta pemilu 2004. Dari *database* yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas berupa buku mengenai profil partai politik peserta pemilu 2004 dengan judul *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, kita bisa membaca *platform* atau program partai dengan lengkap. Terlebih lagi, dari buku ini sebenarnya kita bisa lebih memetakan atau memperkuat analisis tentang sistem kepartaian atau partai politik itu sendiri. Karena di dalam buku setebal 550 halaman ini, kita bisa membaca dengan jelas juga tentang sejarah kemunculan partai politik peserta pemilu 2004. Selain itu, kita akan lebih mudah mengidentifikasi siapa sebenarnya “aktor” utama yang ingin berkuasa dengan mengusung “iming-iming” ataupun ketokohnya.

³ Fenomena ini banyak sekali terjadi di tingkat lokal. Di Kalimantan Selatan misalnya, di mana beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi berkoalisi membentuk kepengurusan PNI

Marhaenisme yang pada awalnya tidak ada kepengurusan di wilayah ini.

Genealogi Ideologi atau Kepentingan

Di dalam bab pertama dari buku ini, terdapat bagan genealogi ketiga partai besar (Golkar, PDI, dan PPP) yang mungkin sengaja dibuat oleh Daniel Dhakidae untuk memberikan gambaran ringkas tentang pembentukan partai politik 2004-2009 yang dijelaskan secara rinci dalam bab berikutnya. Namun jika telah membaca genealogi ini secara lengkap di dalam bab kedua, dan kemudian mencermati perolehan suara dari partai yang merupakan pecahan dari partai besar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partai yang masih memiliki strategi politik aliran akan tergilas oleh partai besar yang memiliki kesamaan ideologi. Hal ini terbukti bahwa partai baru sebagai bentukan dari pecahan partai lama hanya akan memperoleh suara rata-rata maksimal 2%. Namun begitu, perolehan suara induknya akan mengalami pengurangan. Lihat saja PDI-P yang melahirkan dua pecahan partai baru yang masih berideologikan sama. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (Partai PDI) yang diketuai oleh Dimmy Haryanto dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) yang diketuai oleh Eros Djarot tidak bisa menembus perolehan suara 2% karena masih relatif memiliki kesamaan ideologi. Hanya saja PNBK yang lebih mengentalkan paham Marhaenisme-nya bisa meraup lebih banyak suara dibandingkan dengan Partai PDI. Jika Partai PDI dan PNBK mengharapkan limpahan *swing voter* dari PDI-P karena citranya yang melemah, tentu saja masih jauh dari harapan. Massa mengambang yang tidak lagi percaya pada Mega, juga akan mengalihkan ideologi nasionalisnya kepada ideologi dan platform lain. Kecuali para kader yang telah terbina baik namun kecewa dengan Mega, mereka tentu akan mencari figur lain dengan basis ideologi maupun ketokohan yang hampir serupa.

Berbeda halnya dengan Golkar, partai ini menghasilkan dua partai sempalan yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang diketuai oleh Edi Sudradjat dan Partai

Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang diketuai oleh R. Hartono. Kedua partai ini sebenarnya bisa dikategorikan ke dalam "partai militer". Sosok pengurus dan jaringan yang coba dibangun berkisar pada elemen militer. Para mantan jenderal yang duduk dalam kepengurusan kedua partai ini mencoba mengakomodasi suara militer melalui jaringan purnawirawan maupun keluarga militer meski TNI dan Polri memiliki kebijakan untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Meskipun begitu, dengan meminjam istilahnya Ikrar Nusa Bhakti, keluarga besar TNI melalui istri dan anak-anaknya adalah "satu suara". Tetapi logika kemudian adalah suara militer tidak akan kuat jika terbagi ke dalam dua kubu (partai) atau lebih, apalagi ada mantan jenderal lain yang dicalonkan sebagai presiden oleh beberapa partai. Maka dari itu, untuk terlihat lebih moderat dan relatif bisa diterima oleh sipil, program yang ditawarkan oleh PKP Indonesia adalah reposisi TNI dan Polri. Bahkan oleh PKP Indonesia, program reposisi ini dijabarkan secara lebih detail dalam lima poin fungsi profesionalisme TNI dan Polri.⁴ Berbeda halnya dengan PKPB, partai ini tidak memiliki program konkret atau hanya menyebutkan program di bidang agama, ekonomi, dan pendidikan tanpa menyebutkan lebih lanjut apa yang diinginkan dalam bidang itu.⁵ Selain mendukung peningkatan profesionalisme TNI dan Polri yang disebutkan dalam 'usaha' PKPB, lebih frontal lagi partai ini mencoba mengembalikan memori dengan mengedepankan "antek Soeharto". Wacana kerinduan atas situasi Orde Baru yang identik dengan "kestabilan" ekonomi, dan keamanan dicoba lagi dengan mempersonifikasikan Mbak Tutut sebagai penerus tahta Soeharto.

Friksi yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah pemilu 1999 lebih dikarenakan keputusan penundaan Muktamar II yang menimbulkan kecurigaan adanya keengganan

⁴ Seperti diuraikan di hlm.207-208

⁵ Program yang dimiliki oleh PKPB adalah terpendek dibanding dengan partai lainnya, yaitu hanya 26 kata. Bisa dilihat di hlm.249.

“penguasa” partai saat itu untuk melakukan regenerasi dan restrukturisasi jabatan dalam PPP. Alhasil, Zainuddin MZ, Djafar Badjeber, dan beberapa kader yang pro-Muktamar 2003 menyatakan keluar dari PPP dan kemudian mendirikan PPP reformasi. Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dipakai untuk menggantikan nama PPP reformasi menggunakan ketua umumnya Zainuddin MZ untuk bisa meraih perhatian massa. Sayangnya, kepopuleran Zainuddin MZ yang dijuluki sebagai “Dai sejuta ummat” tidak bisa secara serta-merta meningkatkan popularitas politisnya, karena mungkin massa lebih rasional dengan membedakan antara dakwah untuk ke-taqwa-an dengan kampanye untuk kekuasaan. Fenomena inilah yang memaksa PBR harus puas mendapat suara sekitar 2%. Meskipun begitu, suara ini cukup signifikan mengurangi “hak suara” PPP.

Strategi Jitu Modernisasi Politik Partai Politik

Jika kita mencermati karakteristik strategi kemenangan pemilu yang dimiliki oleh beberapa partai politik 2004-2009 tampaknya mulai ada perubahan metode. Politik aliran yang dahulu sering dipakai untuk penjaringan massa, kini sudah mulai ditinggalkan. Pemilahan parpol ke dalam nasionalis, Islamis (NU atau Muhammadiyah), sosialis, dan lain sebagainya kini mulai tidak jelas lagi. Banyak partai sekarang yang mengusung nilai-nilai demokratis dan juga reformis. Malahan kemudian beberapa partai tertentu bangga dengan nilai-nilai lama seperti “Soekarnoisme” dan “Soehartoisme”, sehingga program yang disusun dan asas yang dijadikan landasan partai semakin bias dengan strategi baru pengumpulan massa.

Sebenarnya, kita bisa melihat apa yang menjadi preferensi perjuangan suatu partai politik dari dua elemen politik sekaligus. Yang pertama adalah dari sisi masyarakat, dan yang kedua adalah dari sisi partai itu sendiri. Dari sisi masyarakat, mau tidak mau kita harus menyatakan bahwa yang masih terjadi adalah fenomena pragmatisme. Wacana yang telah ber-

kembang lama di masyarakat dijadikan pelajaran bagi preferensi politik mereka. Terlebih lagi semakin bertambahnya *middle class* menjadikan pilihan-pilihan politik mereka lebih realistis. Memang, sejak awal masyarakat tidak pernah membaca program partai. Realitas politik-lah yang menjadi preferensi pilihan mereka, karena di sisi yang kedua, partai politik hanya beretorika dengan program semu dan mengedepankan *platform* atau ideologi lama peninggalan “nenek moyang”. Program-program partai yang disusun sedemikian rupa hanyalah bersifat administratif atau sebagai pelengkap kepengurusan. Sedangkan ideologi seperti nasionalis, militeris-birokratis, sosialis, dan religius yang lebih dijadikan jargon kampanye hanya dipakai untuk mengelabui masyarakat.

Sistem proporsional terbuka juga memberikan peluang bagi partai menggunakan caleg nomor jadi sebagai *vote getter*-nya. Sistem inilah kemudian juga turut dalam melunturkan politik aliran tersebut. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepertinya lebih menerapkan strategi berlapis. Di satu sisi, PKB tetap mengusung Gus Dur sebagai calon presiden tunggalnya, dan di sisi lain menggunakan mekanisme pencalonan anggota legislatif dengan menampilkan sosok populis. Mekanisme yang dilakukan oleh PKB dengan *political appointee* memberikan nuansa penjaringan massa dengan tetap memperhatikan jasa pengurus partai, sedangkan mekanisme *professional appointee* lebih memberikan nuansa kualifikasi profesi caleg partai meskipun harus mengambil dari luar struktur kepengurusan. “Keterbukaan” aliran inilah membuat PKB mengumpulkan suara yang cukup signifikan. Sebagai contoh yang terjadi di NTT, dari 19 orang caleg PKB Ende, 9 orang (47,4%) adalah caleg beragama Katolik. Di daerah pemilihan Ende 4, empat orang dari lima calegnya beragama Katolik, kendati berada di nomor urut 2, 3, 4, dan 5, sementara caleg ber-

agama Islam di nomor urut 1 daerah pemilihan yang sama.⁶

Hampir sama halnya dengan PDI-P, partai ini mengusung nama-nama beken termasuk artis di beberapa daerah pemilihan strategis, sehingga Taufik Kiemas harus menerima kenyataan dikalahkan oleh Marisa Haque di daerah pemilihan Jawa Barat II. Meski banyak opini mengenai keterpurukan PDI-P akibat kegagalan pemerintahan Mega, namun dalam kenyataannya perolehan suara partai ini tetap tinggi meski mengalami penurunan sekitar 14% dibanding hasil pemilu 1999. Kepintaran Mega dalam menjual "Moncong Putih"-nya patut diacungi jempol, sehingga sempat memunculkan kecurigaan beberapa pihak terhadap PDI-P (partai pemerintah) dalam melakukan rekayasa. Mereka menilai perhitungannya tidak sinkron dengan hasil penghitungan suara di pelbagai daerah. Alhasil, kemudian aliansi 19 partai muncul untuk menolak hasil pemilu 2004.⁷

Sebagai partai yang berkuasa di masa Orde Baru, Golkar masih tetap menancapkan pengaruh kuatnya dalam pemilu 2004. Kasus yang menimpa Akbar Tandjung ternyata tidak menyurutkan perolehan suara partai yang berlambangkan pohon beringin ini. Memang tampaknya Golkar sekarang lebih hebat dengan komposisi kadernya yang lebih beragam dan modern. Beberapa pengusaha, purnawirawan, dan politisi beken mewarnai partai ini untuk menjaring massa di daerah

urban. Namun sayang sekali, tampaknya perolehan suara terbanyak partai Golkar lebih berasal dari daerah rural. Banyak warga pedalaman yang masih susah melepaskan kepercayaan atau memorinya akan "jasa-jasa" yang diberikan Golkar. Banyak "orang lama" yang percaya bahwa keberhasilan anak-anaknya dalam bekerja akibat jasa Golkar yang hingga kini menggajinya. Ditambah lagi fasilitas dan "kemakmuran" yang sekarang berkembang adalah akibat kinerja Golkar. Sebagai contoh lagi di daerah pedalaman Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan beberapa daerah di Sumatera yang masih kuat memori sosialnya terhadap nama Golkar, meski reformasi menyudutkannya, namun nama ini tidak gampang tergantikan oleh nama lain yang juga mengusung janji lain.⁸

Untuk itulah, hal terpenting bagi Golkar adalah membuat strategi awal dalam menaikkan popularitas partainya dalam pemilu legislatif. Konvensi yang dilakukan Golkar dengan dalih mengatasi krisis kepemimpinan partai lebih tepat dikatakan sebagai cara untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap partai ini. Jauh hari sebelum pemilu legislatif, Surya Paloh hadir setiap malam di saluran TV pribadinya dan sengaja keliling Indonesia dengan pesawat yang khusus dibeli dari Inggris. Jusuf Kalla berkampanye di daerah Timur, Sultan Hamengku Buwono X mewakili "kawula Yogya", dan lain sebagainya dalam berkampanye untuk menjadi presiden tetap tidak lepas dengan membawa atribut Golkarnya. Itulah skenario luar biasa hebat dalam pertunjukan opera politik kepartaian.

Perlu untuk dicermati juga bahwa ideologi dan program yang ditawarkan bukanlah suatu alat bagi perjuangan beberapa partai politik di Indonesia. Hanya sedikit parpol yang menggunakan programnya untuk menarik simpati massa. Misalnya saja, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berhasil menaikkan pamornya

⁶ Hasil penelitian Syamsuddin Haris tentang "Proses Pencalonan Anggota Legislatif Lokal 2004", (Jakarta, 2004).

⁷ Kemunculan Aliansi 19 partai merupakan fenomena yang lebih meyakinkan kepada kita bahwa banyak oportunist politik yang tidak bisa berpikir panjang mengenai proses yang sewajarnya. Jelas keberatan mereka hanya didasarkan pada prasangka buruk yang tanpa bukti. Radikalisasi keputusan beberapa anggota (*elite*) parpol tersebut layaknya seperti sikap partisan yang hanya mengandalkan emosi belaka. Seperti halnya peristiwa pengeroyokan terhadap ketua KPU Kabupaten Seluma, Bengkulu oleh para partisan parpol yang tidak puas dengan hasil pemilu 2004, fenomena ini mengindikasikan budaya kekerasan massa yang masih sukar untuk dihilangkan.

⁸ Pendapat ini terutama dikemukakan oleh orang-orang tua yang tidak terpengaruh oleh isu reformasi. Hasil observasi langsung di Palembang dan Banjarmasin.

melalui program anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Perolehan suara PKS yang naik secara signifikan dari 1,35% (1999) menjadi sekitar 6% secara nasional pada pemilu 2004, memang dibangun atas realitas kesuksesan beberapa kadernya yang duduk dalam lembaga legislatif. Memang sebenarnya, basis massa PKS sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Karena bagaimanapun rasionalitas yang dibangun oleh PKS sangat mudah dipahami oleh *middle class* dan *elite*. Tampaknya untuk wilayah *rural*, masih terlalu paternalistik untuk bisa menerima PKS. Patronase dan politik aliran yang masih melekat kuat akan menyebabkan terfokusnya suara ke partai-partai besar yang berideologikan Nasionalis, Islam (NU dan Muhammadiyah), dan bahkan kekuatan lama Orde Baru melalui Golkar-nya.

Kader Oportunis dan Kader Nominatif

Jika kita juga mencermati fenomena kemenangan dan juga kekalahan beberapa parpol dalam pemilu legislatif 2004, maka kita bisa melihatnya lebih dalam dari caleg dan capres yang diunggulkan. Pemunculan caleg ini sangat penting karena paling tidak kita bisa melihat kualitas dan soliditas partai. Kemudian pemunculan wacana capres dalam pemilu legislatif juga bisa memberikan gambaran kepada kita tentang apa sebenarnya yang menjadi motif atau tujuan partai politik. Dari sanalah juga kita bisa mencermati kesungguhan partai politik dalam kerangka fungsi yang sebenarnya, dan juga kita bisa mencermati fungsi partai yang hanya dipakai sebagai mesin politik segelintir orang untuk bisa berkuasa.

Dari persoalan tersebut, kita bisa membagi dua pengertian yang bisa dipakai sebagai pisau analisisnya. Yang *pertama* adalah apa yang disebut dengan 'kader oportunis'. Kader oportunis lebih mengarah ke persoalan pencalonan hanya karena kedekatan dengan salah seorang pengurus atau yang diperkirakan memiliki basis massa yang kuat, dan bukan tempaan dari dalam. Pembilahan *kedua* adalah 'Kader

nominatif' yang lebih bermakna 'positif' karena penentuan caleg merupakan kesepakatan besar dari pengurus dan kader partai dalam rangka kemenangan pemilu. Perbedaan yang sebenarnya adalah terletak pada tingkat akseptabilitas massa (kader) partai. Jika 'Kader oportunis' relatif lebih oligarki, sedangkan 'kader nominatif' lebih populis dalam penentuannya sebagai caleg atau capres.

Fenomena kader oportunis sebenarnya merupakan hasil dari sistem oligarki atau kekuasaan besar yang dimiliki oleh segelintir orang di dalam kepemimpinan parpol. Misalnya saja yang telah menimpa PAN. Diakui pula oleh beberapa kader PAN bahwa banyak orang-orang oportunis di lingkungan terdekat Amien yang mengisi caleg tidak berkualitas dari luar partai yang dipaksakan oleh kaum oportunis tersebut, sehingga tidak dikenal oleh masyarakat. Kemunculan calon itu tidak lain karena direkrut oleh segelintir pengurus yang memiliki kekuasaan di dalam partai tersebut.⁹

Oportunisme atau oligarki di dalam tubuh partai sebenarnya memiliki potensi yang signifikan terhadap perolehan suara. Sebab bagaimanapun juga, apa yang dipikirkan oleh elit (pengurus) tidaklah sama dengan apa yang dirasakan oleh kader atau massa. Jelas, kader yang kecewa akan bisa berubah menjadi *swing voters* atau *undecided voters* jika calon mereka tidak berada dalam posisi yang diharapkan. Dari situlah masyarakat akan menilai kadar soliditas partai.

Berbeda dengan yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat. Soesilo Bambang Yodhoyono (SBY) yang bukan merupakan fungsionaris Partai Demokrat sengaja dinominasikan oleh partai ini untuk mendapatkan suara yang signifikan.

⁹ Untuk kasus lokal lain misalnya, fenomena ini terjadi dalam pencalonan caleg PDI-P Pandeglang. Dimana sejumlah pengurus memasang kakak seorang bupati — yang notabene hanya partisan — dalam nomor urut dua, dan menyingkirkan tokoh yang dianggap populis oleh para kader. Alhasil, memunculkan protes dari hasil kekecewaan para kadernya. Hasil penelitian Lili Romli tentang "Proses Pencalonan Anggota Legislatif Lokal 2004".

Pengaruh suara SBY sangat besar sehingga cukup signifikan juga dalam memberikan porsi kepada calegnya untuk duduk di kursi legislatif. Bahkan secara ekstrem, Partai Demokrat sengaja didirikan hanya sebagai mesin politik bagi SBY untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2004. Jika kita baca buku dari Kompas ini di halaman 172-173, maka Partai Demokrat adalah partai yang dengan jeli membaca momentum keunggulan SBY, mengingat pencalonan SBY sebagai calon wakil presiden pada tahun 2001 berada di urutan ketiga.

Di halaman 174 juga disebutkan bahwa langkah Partai Demokrat akan meniru strategi Partai Thai Rak Tai (Partai Cinta Thai atau PTRT) yang menang karena mengajukan program konkret dan janji besar kepada para petani di pedesaan seperti akan menaikkan harga barang-barang produksi petani sampai dua-tiga kali lipat. Menariknya, ketika kita telusuri program kerja Partai Demokrat ini, tidak ada satu pun yang menyebutkan masalah pangan ataupun produksi petani. Hampir sama dengan partai lainnya, program Partai Demokrat yang menurutnya paling konkret ternyata hanya memberikan alternatif yang sifatnya relatif "permukaan" saja, sedangkan semangat untuk memperjuangkan rakyat kecil tidak disertai dengan program khusus untuk itu.

Penutup

Perlu sekali lagi digarisbawahi bahwa program partai bukanlah barang yang laku untuk dijual kepada massa. Secara pragmatis, yang lebih diyakini masyarakat adalah sosok seorang pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan konkret bagi peningkatan sumber daya masyarakat dan negara. Pengalaman pahit masyarakat akibat janji PDI-P menyebabkan resistensi masyarakat terhadap bentuk program. Masyarakat kini semakin kritis dalam menyikapi janji-janji politik dari parpol. Di beberapa daerah, kita lihat adanya mekanisme baru kontrak politik atau kontrak sosial yang terjadi antara masyarakat dengan partai politik

dalam menyikapi segala janji parpol. Meskipun intuisi yang digunakan dalam melakukan pilihan, namun kerinduan seorang sosok adalah hal terpenting bagi alasan memilih.

Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Daniel Dhakidae dalam bab pertama buku ini adalah masih muncul dan semakin menguatnya oligarki partai dalam sistem kepartaian di Indonesia. Oligarki yang dianggap strategis bagi pengurus partai politik dalam manajemen organisasinya, justru akan menimbulkan problem mendasar bagi keberlangsungan partai politik yang bersangkutan. Masalah *pertama* adalah akan menyebabkan keputus-asaan beberapa kader yang tidak terakomodasi; *kedua*, jika oligarki ini semakin mengental menjadi oportunist maka bisa menyebabkan kekecewaan konstituen; dan akhirnya *ketiga*, akan terpecahnya partai ini menjadi beberapa partai lain, dan atau kemudian semakin hilangnya perolehan suara untuk partai ini.

Kalau dilihat dari banyaknya persoalan di atas, sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa sistem kepartaian di Indonesia masih mencari bentuknya yang stabil. Stabil dalam hal jumlah dan karakter maupun fungsi. Memang, kondisi saat ini masih susah untuk menempatkan fungsi parpol sebagaimana seharusnya. *Pertama*, sifat oligarki yang masih melekat dalam kepengurusan parpol sangat susah untuk memfungsikan partai sebagai pembentuk kader politik. Apalagi jika kemudian di sana masih dihadapkan oleh fenomena oportunist yang jelas-jelas bertolak belakang dengan semangat kebersamaan dan *merit system* di dalam mekanisme partai 'Kader' bahkan di dalam partai 'Massa' sekalipun. *Kedua*, partai politik sering mengalami friksi atau konflik internal yang juga bertolak belakang dengan fungsinya dalam mengendalikan konflik masyarakat. Fokus mereka sebenarnya adalah bagaimana memperrebutkan jabatan di dalam partai dan bagaimana bisa tampil di kursi dewan meski harus berakibat perpecahan di dalam tubuh partai itu. Padahal, konflik massa

lebih bersifat irasional dan berpeluang destruktif, dan akan lebih anarkis jika elitnya oportunis. **Ketiga**, tertutupnya sosialisasi politik yang seharusnya juga merupakan fungsi parpol tergantikan dengan fungsi KKN di dalam parlemen, dan fungsi penguatan oligarki ekstra parlemen. **Keempat**, fungsi komunikasi politik yang seharusnya menempatkan partai politik dalam posisi tengah antara eksekutif dan masyarakat, ternyata hanya berat sebelah karena posisi hitung-hitungan yang lebih saling menguntungkan dengan eksekutif dibandingkan jika berpihak kepada masyarakat.

Akhirnya, buku ini merupakan terobosan baru yang bisa dipakai sebagai

voters education maupun cermin bagi partai yang bersangkutan untuk memberikan warna yang lebih demokratis bagi sistem kepartaian di Indonesia. Sangat sulit menemukan kelemahan dari buku ini, mengingat sejarah singkat yang dibumbui dengan profil ketua umum, misi dan visi partai, *platform*, dan program partai politik 2004 cukup menjelaskan mengenai karakternya. Namun akan lebih komprehensif jika di dalam buku ini dilengkapi dengan peta basis kekuatan — kepengurusan dan analisis basis massa partai politik sampai dengan kepengurusan paling bawah, sehingga akan lebih mudah bagi pembaca untuk menilai kapasitas parpol peserta pemilu.

Selamat Membaca.